

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sri Handayani, Nisa Mutiara

Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Islam Kediri, Kediri.

Email: srihandayani@gmail.com

Abstract

A library's transformation based on social inclusion can be understood as a library that offers information services open to a whole community with a variety of backgrounds, characteristics, abilities, status, condition, ethnicity and culture to develop its own potential to support economic well-being. This qualitative research was carried out at UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Library to find out the implementation of transformation of library based on social inclusion, obstacles encountered and efforts to optimize in order to improve the well-being of the public. The results of the research indicate that library transformation base on social inclusiveness has been well implemented with some obstacles the number of participants exceeds the available capacity, budget constraints, the distribution of participants is not even, including not reaching disability, the limitation of competent sources, the absence of training or refreshment to the committee (SDM), limited activities in training, not continuing on the accompaniment of management, marketing, until market availability according to product segments or business matching, and the stigma of the community that the library is an exclusive place raises reluctance to visit. The optimization of the library transformation program based on social inclusion has been carried out in a manner; conducted pre and post test as well as public satisfaction survey on the implementation of library Transformation activities based on Social inclusion, measurement of success rates and search of impact story data of the training results followed, conducted evaluation process of each end of the activity to see the existing shortcomings and then improved on the subsequent activities, performed a study on the impact of the resulting of the activities of the transformation of libraries based on social inclusion on the community who become participants of such activities, as well new improvements every year.

Keywords: library, social inclusion, social well-being, community development.

Latar Belakang Teoritis

Pembangunan manusia adalah suatu paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai pusat dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan pembangunan: pengelolaan sumber daya (pendapatan untuk penghidupannya yang layak), derajat kesehatan (harapan hidup yang panjang dan sehat), perbaikan, perbaikan kesejahteraan, dan pendidikan (Sangkereng, *et al.*, 2019). Pembangunan bangsa ini tidak terlepas dari visioner cemerlang dari founding fathers negara Bung Karno yang memiliki cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memajukan kesejahteraan umum (Arifin & Muslim, 2020). Sebagai warga negara dengan berbagai peran masing-masing, kita perlu mengemban amanah ini secara konstitusi melalui pendidikan karakter yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Konsep berdikari memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan akses layanan informasi sebagai pusat pengkapasitasan sumber daya manusia.

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno melakukan transformasi layanan

perpustakaan untuk mewujudkan layanan perpustakaan inklusif dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penguatan literasi. Penerapan literasi informasi kepada masyarakat perlu diberikan sejak dini dengan pendekatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Melalui pendekatan inklusif, perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan (Haryati, 2019).

Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dipahami sebagai perpustakaan yang menawarkan layanan informasi terbuka kepada seluruh masyarakat dengan berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik maupun budaya untuk mengembangkan potensi diri guna mendukung kesejahteraan ekonomi. Perpustakaan memiliki peran sentral sebagai penghubung informasi dengan masyarakat bahkan dapat berperan sebagai wahana yang nyaman untuk mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya peningkatan literasi dan kesejahteraan masyarakat di UPT Perpustakaan Bung Karno ini telah menjadi program prioritas nasional dan dimasukkan dalam RPJMN tahun 2020 hingga 2024 yang digulirkan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Perpustakaan Nasional RI yang mana dirancang pada Rancangan Kebijakan Pembangunan (RKP) 2019 (Djaenudin & Trianggoro, 2020). Inklusi sosial yang dilakukan di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno berjalan sejak tahun 2020 ini berorientasi pada masyarakat yang berada di wilayah Blitar dan sekitarnya. Maka, penelitian kualitatif terhadap program inklusi sosial ini dilakukan melalui metode pengambilan data observasi, *in-depth interview* dan *focused group discussion* dengan fokus penelitian yaitu mengetahui implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, kendala-kendala yang dihadapi dan optimalisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Ekonomi Berdikari

Dilansir dari <https://www.perpusnas.go.id/>, dalam liputan kegiatan Internalisasi Pemikiran Bung Karno Tentang Kemandirian Ekonomi pada 8 Juni 2023 di Gedung Perpusnas RI, Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP 2018 Yudi Latif mengatakan, program Trisakti dicanangkan Bung Karno sebagai program pengembangan kemandirian ekonomi. Konsep Trisakti mempunyai tiga aspek, yaitu kedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan kepribadian dalam bidang kebudayaan. Yudi juga menyampaikan bahwa ketiga aspek tersebut saling terkait dan memberi pengaruh satu sama lain dalam upaya mencapai kedaulatan. Pandangan Soekarno terhadap sektor ekonomi menjadikan Indonesia sebagai negara yang rasional secara ekonomi dengan menentang otoritarianisme dan memperkuat kekuasaan dan kekuatan ekonomi negara (Dhakidae, 2013). Sukarno menunjukkan bahwa untuk mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka, Bangsa Indonesia harus bergerak menghancurkan

kapitalisme dan imperialisme. Pidato Bung Karno yang berjudul “Manifesto Ekonomi 28 Maret 1963” memuat banyak gagasan dasar tentang strategi perekonomian. Bung Karno berusaha menggunakan analisis Marxis untuk menanggapi permasalahan perekonomian Indonesia. Sukarno mengatakan kedaulatan politik dan budaya tidak dapat dicapai tanpa kemandirian ekonomi. Demikian pula, bangsa kita tidak dapat mencapai kemandirian ekonomi tanpa kemandirian politik dan individu (Rakhman & Hidayat, 2022).

Teori ekonomi perekonomian swasta Sukarno menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah yang mampu menciptakan perekonomian tersendiri. Material yang ada dapat dimanfaatkan untuk ditransformasi menjadi pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari. Menjadi mandiri bukan berarti negara dan rakyat kita harus menentang bau orang lain atau apapun yang berasal dari luar. Kemerdekaan bukan berarti xenophobia, xenophobia atau penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari 'luar'. Otonomi yang digambarkan Bung Karno adalah sifat kemasyarakatan dan kecanggihan organisasi perekonomian masyarakat Indonesia.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Penyelenggaraan Perpustakaan Indonesia merupakan pelaksanaan amanat nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi bangsa yang cerdas. Perpustakaan Nasional juga berperan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif, dan inovatif sesuai Program Nawacita Menuju Indonesia Raya ke-9 dengan mengembangkan SNP, menjamin kesinambungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, dan menjamin pemerataan akses terhadap layanan perpustakaan di tanah air. Enam Tugas Perpustakaan Nasional (perpustakaan, repositori, sumber daya, penelitian, penyimpanan dan pembangunan pusat jaringan perpustakaan) sejalan dengan misi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membuat resolusi pembangunan bersama hingga tahun 2030 yang dikenal dengan istilah tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep inklusi sosial dicetuskan tahun 1970-an di Perancis untuk merespon krisis kesejahteraan di negara-negara Uni Eropa. Pemikiran ini kemudian terdistribusi ke seluruh Uni-Eropa pada tahun 1980an hingga 1990an. Pada pertengahan Maret 1995, di Kopenhagen, Denmark, diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas isu pembangunan sosial, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Kopenhagen tentang Pembangunan Sosial (*Copenhagen Declaration On Social Development*). Pada pertemuan di Kopenhagen ini, para pemimpin dunia berjanji untuk memerangi kemiskinan dan memajukan masyarakat yang stabil, aman dan adil sebagai tujuan utama pembangunan. Konsep yang diterapkan pada perpustakaan menjadi Program Pengembangan Perpustakaan Nasional dengan nama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan/BAPENAS juga telah mengesahkan kebijakan ini pada tahun 2018. Kemudian, di tahun 2019, BAPPENAS membuat target yaitu agar perpustakaan dapat merancang hingga menyelenggarakan kegiatan inklusi sosial di 300 titik lokasi dengan alokasi pembiayaan sebesar 145 miliar rupiah didukung anggaran DAK bernilai 300 miliar.

Secara teoritis inklusi sosial merupakan proses yang memungkinkan bagi individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam kehidupan sosial (Simarmata, 2017). Pengertian inklusi sosial berkebalikan dari eksklusi sosial, yaitu keadaan dimana suatu komunitas atau individu dikucilkan, yang berdampak pada komunitas atau individu tersebut berupa hilangnya kekuasaan dan kemampuan untuk masuk untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam berbagai proyek sosial. Secara umum, eksklusi sosial terjadi karena adanya perbedaan status sosial, persepsi atau keadaan yang mengakibatkan terjadinya eksklusi sosial (Ningrum, 2019). Inklusi sosial terkait dengan advokasi hak asasi manusia, peningkatan kapasitas komunitas, dan partisipasi komunitas, namun penekanan pada inklusi sosial diarahkan pada

komunitas rentan dan kelompok marginal. Masyarakat marginal merupakan masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam ruang publik, perekonomian, akses terhadap pelayanan publik dan hak-hak lainnya (Gutama dan Widiyahseno, 2020).

Secara definisi, pengertian inklusi sosial pertama-tama melihat pada makna pemberdayaan, dan juga dikaitkan dengan dukungan dan partisipasi terhadap hak asasi manusia. Sebab, prinsip nilai inklusi sosial mencakup pemberdayaan, dukungan terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi. Pemberdayaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemandirian dan jati diri individu berdasarkan sumber daya manusia berupa kekuatan dan kemampuan hidup dalam latihan, dukungan teknis dan bimbingan (Yulisnaini, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno merupakan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peresmian perpustakaan ini dilakukan oleh Presdien Ke- 4 Megawati Soekarno Putri pada 3 Juli 2004 dan berlokasi di kawasan Makam Bung Karno yaitu di Jalan Kalasan no 1, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno berupaya melakukan program pengembangan pelayanan perpustakaan berbasis Inklusi Sosial melalui kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan dan kreativitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai ketrampilan yang berorientasi pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat serta memperkuat peran fungsi perpustakaan agar tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi menjadi tempat berkreaitivitas dan berkarya.

Wijayanti (2019) mendefinisikan inklusi sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat didefinisikan sebagai perpustakaan yang menawarkan jasa layanan informasi yang terbuka kepada seluruh masyarakat dengan

berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya untuk mengembangkan potensi diri untuk peningkatan ekonomi. Perpustakaan berperan sentral sebagai penghubung informasi dengan masyarakat bahkan dapat berperan sebagai wahana yang nyaman untuk mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno telah dilaksanakan dengan baik dalam berbagai kegiatan inklusi sosial dengan harapan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam rangka mendukung peningkatan pengetahuan akan keterampilan khusus sehingga hasil keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di UPT Perpustakaan Bung Karno memiliki beberapa kegiatan yang direncanakan dan dijalankan, adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah literasi wastra nusantara, literasi hidroponik dan literasi pemanfaatan daur ulang limbah.



Gambar 1. Literasi Wastra Nusantara

Eny Setyawati, salah satu peserta kegiatan literasi wastra nusantara yang merupakan seorang pengrajin batik mengatakan bahwa dengan mengikuti kegiatan ini membuatnya dapat belajar mengenai wastra nusantara dalam dunia batik. Materi yang dipelajari dalam kegiatan literasi wastra nusantara ini dianggap Eny telah menambah wawasannya bahwa wastra tidak

hanya tentang batik, melainkan ada songket, tenun, kain ikat, dan batik pendulum yang dipelajarinya dari perpustakaan ini sehingga menambah inovasi dan kreasi dari produk yang dibuatnya. Berkesempatan mengikuti kegiatan ini memberinya kesempatan mempromosikan batik djagad jowo milik Eny terbukti dengan meningkatnya penjualan kain batiknya. Setelah mengikuti literasi wastra nusantara, kualitas batik miliknya makin berkualitas, terjual dengan baik setiap mengikuti pameran, bahkan Eny juga berhasil menciptakan batik khusus untuk perpustakaan proklamator Bung Karno yang dinamai Batik Trisakti yang mana kini menjadi Hak Cipta Perpustakaan Bung Karno dengan bantuan pihak perpustakaan.

Literasi hidroponik diikuti oleh masyarakat dari berbagai unsur yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam mengembangkan teknik bercocok tanam modern guna mendukung peningkatan ketrampilan dan kreativitas sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendaftaran peserta dilakukan secara terbuka melalui laman resmi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang kemudian dilakukan penyaringan peserta. Kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 23-25 April 2024 di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.



Gambar 2. Literasi Hidroponik

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut ini mendapatkan respon positif dari masyarakat umum dan khususnya yang mengikuti kegiatan ini secara langsung. Rian Dwi Prihandono, salah satu peserta literasi hidroponik menyatakan bahwa dengan keikutsertaan dirinya di kegiatan ini telah menginspirasi untuk memiliki kebun hidroponiknya sendiri mengingat beberapa waktu sebelum ini, Rian memiliki pemikiran tentang peluang bertani metode hidroponik. Mengikuti pelatihan ini dianggapnya

menjawab beberapa hal yang diragukannya menjadi semakin yakin untuk memulai sendiri.

Literasi Pemanfaatan Daur Ulang Limbah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan keterampilan sehingga hasil keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Tujuan Kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan memotivasi untuk mengasah dan mengembangkan potensi serta keahlian dalam pemanfaatan daur ulang limbah, memfasilitasi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemanfaatan daur ulang limbah, mewujudkan masyarakat Indonesia gemar berkreasi, sarana pembelajaran konsep baru dalam pemanfaatan daur ulang limbah, sarana pelatihan pemanfaatan daur ulang limbah, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan daur ulang limbah.

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama tiga hari pada Senin-Rabu, 6-8 Mei 2024 di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Peserta mendapatkan teori dari praktisi profesional, kemudian pembahasan mengenai konsep pemanfaatan limbah, manajemen sampah modern yang biasa disebut dengan 6R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace, Refill, and Repair*) lalu pada hari kedua dan ketiga para peserta menerapkan praktik pembuatan kerajinan dari bahan limbah, Sehingga hasil dari kegiatan ini dapat berdaya guna dan benar-benar diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri serta masyarakat di sekitar.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini tidak lantas membuatnya bebas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Tiga informan yang merupakan pustakawan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno menyatakan beberapa kendala yang dihadapi:

“...Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial hanya berfokus di area pelatihan saja, akan lebih baik lagi jika TPBIS bukan hanya sekedar pelatihan, namun juga memberikan bantuan berupa modal usaha atau peralatan kerja bagi masyarakat yg ingin memulai usaha dari pelatihan yang telah

diikuti Jumlah peserta pelatihan yg terlalu banyak dan waktu pelatihan yang relatif singkat.” (Nurny Syam)

“...Belum dapat meratanya penerima pelatihan TPBIS kepada seluruh masyarakat yang ada di Blitar, Kurangnya materi yang dapat disampaikan kepada Masyarakat karena terkendala dengan anggaran, Sulitnya mencari narasumber yang kompeten dibidangnya, terlebih jika hanya mengandalkan narasumber dari wilayah blitar raya, Tidak adanya pelatihan atau penyegaran kepada panitia terkait dengan program TPBIS, Kendala akomodasi dan transportasi bagi warga yang diluar Blitar namun tertarik dengan pelatihan TPBIS. ...Masyarakat masih menganggap perpustakaan adalah tempat yang eksklusif, hanya tempat untuk membaca, meminjam atau mengembalikan buku, hal ini dapat menghambat program TPBIS.” (Hery Purwanto)

“...Keterbatasan anggaran. Banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengikuti kegiatan karena memang hasil dari kegiatan ini, mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan sehingga bisa memberikan efek kepada peningkatan ekonomi. Namun karena keterbatasan dana yang tersedia untuk program inklusi sosial masih belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sehingga dari sekian banyak pendaftar kegiatan perlu dilakukan seleksi.

...Stigma terhadap kelompok marginal: Masyarakat masih memiliki stigma terhadap kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa tidak diterima dan nyaman untuk menggunakan perpustakaan.” (Yunita Pertiwi)

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Tujuan kebijakan transformasi

perpustakaan berbasis inklusi sosial salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran fungsi perpustakaan agar tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi menjadi tempat berkegiatan dan berkarya.

Berikut ikhtisar permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan:

1. Jumlah peserta melebihi kapasitas yang tersedia.
2. Keterbatasan anggaran
3. Sebaran peserta belum merata, termasuk belum menjangkau disabilitas
4. Keterbatasan narasumber yang kompeten
5. Tidak adanya pelatihan atau penyegaran kepada panitia (SDM)
6. Kegiatan terbatas di pelatihan, tidak berlanjut pada pendampingan manajemen, pemasaran, hingga ketersediaan pasar sesuai segmen produk maupun *business matching*
7. Stigma masyarakat bahwa perpustakaan merupakan tempat eksklusif menimbulkan keengganan untuk berkunjung

Pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dinilai oleh Nurny Syam (Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno) telah berhasil memengaruhi masyarakat untuk mau terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno sehingga secara tidak langsung meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Misi mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dianggap Hery Purwanto memiliki peran penting dalam peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai pemustaka karena program ini memiliki ragam kegiatan yang dapat diikuti oleh berbagai latar belakang bidang yang digeluti masyarakat baik dalam hal profesional berdasarkan profesi, budaya, hingga yang mengikuti karena panggilan minat/hobi.

Yunita Pertiwi berpendapat bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini telah meningkatkan jumlah anggota dari peserta kegiatan, meningkatkan frekuensi kunjungan serta meningkatnya partisipasi dalam kegiatan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi perpustakaan secara langsung dapat

meningkatkan tingkat literasi masyarakat, maka secara tidak langsung kemudian akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kegiatan perpustakaan yang inklusif mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan relasi, ruang berbagai pengetahuan dan keterampilan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, program ini memiliki harapan dapat menggeser stigma masyarakat bahwa perpustakaan dapat menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan masyarakat di berbagai bidang.

Tindak lanjut pada beberapa kendala-kendala yang dihadapi para praktisi pelaksanaan program transformasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno berbasis inklusi sosial, para informan dalam *focused group discussion* yang dilaksanakan menyampaikan beberapa ide solusi yang dilakukan sebagai berikut:

"...Merubah paradigma Masyarakat, dengan mengajak mereka untuk datang ke perpustakaan, membuat acara yang dekat dengan mereka seperti kesenian, Memberikan informasi tentang TPBIS melalui sosial media, yang lekat dengan anak-anak muda, Mendatangi kelompok2 masyarakat, dan memberikan informasi tentang TPBIS."

"...Menambah jumlah panitia yang berkecimpung dalam kegiatan TPBIS, Penambahan anggaran, Mencari alternatif narasumber dari luar kota Blitar, Memberikan peningkatan kapasitas SDM kepada penyelenggara TPBIS, Melakukan kegiatan TPBIS diluar wilayah Blitar." (Hery Purwanto)

"...Pengajuan kepada perpustakaan nasional tentang variasi program seperti pemberian bantuan atau pendampingan kepada masyarakat yang telah menerima pelatihan agar hasil pelatihan semakin nyata dampaknya." (Nurny Syam)

"...Mengusabakan penambahan anggaran."
"...Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya literasi dan inklusi sosial, serta manfaat program perpustakaan untuk kelompok marginal." (Yunita Pertiwi)

Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa informan mengerucut pada upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno adalah:

1. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa perpustakaan untuk semua kalangan masyarakat yang tidak hanya sebagai gudang buku melainkan juga pusat informasi dan pengetahuan. Perpustakaan merupakan gudang dimana ilmu pengetahuan dapat digali dan dieksplorasi, bukan sekedar tempat berisi buku-buku, oleh karenanya pemustaka bisa menyerap informasi di perpustakaan menjadi sumber pembelajaran dan mengembangkan ilmu pengetahuannya (Endarti, 2022).

2. Publikasi masif secara online untuk menyampaikan informasi tentang fasilitas dan layanan perpustakaan melalui sosial media yang lebih banyak penggunaannya seperti instagram story, instagram live, instagram feed, tiktok live, video tiktok, twitter, youtube short, live youtube, whatsapp story, whatsapp broadcasting, maupun secara offline dengan memajang X banner di pojok-pojok baca dan perpustakaan keliling maupun komunikasi aktif kepada kelompok-kelompok masyarakat tentang informasi kegiatan inklusi sosial yang akan dilaksanakan. Pemasaran perpustakaan dengan menggunakan sosial media terbukti penting dilakukan atas dasar luasnya cakupan sosial media saat ini meliputi jangkauannya pada pengguna di Indonesia yang semakin banyak adri geyerasi Y dan generasi Z (Utomo, 2022).

3. Seluruh lini pengambilan keputusan di manajemen perusahaan meliputi SDM, sistem operasi, keuangan hingga pemasaran membutuhkan akses data terkini yang dapat diandalkan setiap saat (Rudiawan, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan *repository* masyarakat praktisi bidang-bidang khusus di kawasan zona kerja UPT Perpustakaan Bung Karno dan meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya sebagai bank data narasumber kegiatan sekaligus menjadikannya influencer untuk menginformasikan pendaftaran kegiatan secara langsung maupun tidak langsung (membagikan infografis di sosial media) sebagai influencer di bidang fokusnya sehingga menjangkau

komunitas-komunitas khusus sesuai tema kegiatan yang akan dilaksanakan.

4. Mengupayakan penambahan anggaran dengan mengajukan kepada perpustakaan nasional tentang variasi program seperti pemberian bantuan atau pendampingan kepada masyarakat yang telah menerima pelatihan agar hasil pelatihan semakin nyata dampaknya. Pendampingan kewirausahaan berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas pelaku wirausaha dalam hal manajemen, penguasaan pasar, serta membangun mental kewirausahaan inovatif yang tangguh dan berkelanjutan sehingga lebih siap dalam menghadapi dinamika dunia bisnis (Firman, *et al.*, 2023).

5. Kolaborasi dan integrasi *government*, *civil society* dan *private sector* menjadi langkah penting dalam eksekusi kebijakan serta pelayanan publik demi mencapai tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat (Haryono, 2012). Kolaborasi antar instansi, berjejaring dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya penting dilakukan untuk mengelola keberlanjutan pelatihan yang dilakukan, misalnya dengan memberikan pendampingan manajemen dan bantuan permodalan oleh Dinas Koperasi, memberikan pendampingan Sumber Daya Manusia dan atau penyaluran SDM berkompetensi khusus untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bersama Dinas Ketenagakerjaan, memberikan pendampingan manajemen produk dan penjualan bersama Dinas Perindustrian, dan lain sebagainya.

6. Pengkapasitasan Sumber Daya Manusia bagi Pustakawan selaku panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan inklusi sosial agar dapat memberikan pelayanan sebagai fasilitator belajar masyarakat. Perspektif layanan inklusi sosial perpustakaan untuk melayani masyarakat dengan menyediakan informasi sebagai stimulan ekonomi kreatif dan meningkatkan kompetensi pelaku ekonomi kreatif, maka penting bagi perpustakaan untuk melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga perpustakaan sebagai motor penggerak pembangunan (Prasetyo & Utami, 2020).

Inklusi sosial merupakan pilar utama keberlanjutan pembangunan berdasarkan peran sentral kebijakan publik untuk mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan

partisipasi publik. Inklusi sosial mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkesinambungan melalui kesetaraan akses terhadap peluang pengetahuan dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2023). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meluaskan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat serta secara pasti meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka (Torano, 2021).

Inklusi sosial memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan sosial sebagai penyedia akses kepada sumber daya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup (Yaneri & Deswanti, 2021). Inklusi sosial adalah prinsip yang memiliki urgensi dilakukan dalam membantu individu mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dalam keberagaman, toleransi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Faoziyah, 2023). Sebagai upaya memberikan stimulan untuk masyarakat meningkatkan kesejahteraannya, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno telah mengambil peran dengan baik dalam melaksanakan program-program inklusi sosial. Namun, upaya-upaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia perlu dilakukan agar dapat memberikan dampak lebih besar dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi program pengembangan pelayanan transformasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno telah terlaksana dengan baik melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan dan kreativitas masyarakat, antara lain; literasi wastra nusantara, literasi hidroponik, dan literasi daur ulang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di PT Perpustakaan Proklamator Bung Karno antara lain; jumlah peserta melebihi kapasitas yang tersedia, keterbatasan anggaran, sebaran peserta belum merata, termasuk belum menjangkau disabilitas, Keterbatasan narasumber yang kompeten, tidak adanya pelatihan atau penyegaran kepada panitia (SDM), kegiatan terbatas di pelatihan, tidak berlanjut pada pendampingan manajemen,

pemasaran, hingga ketersediaan pasar sesuai segmen produk maupun *business matching*, stigma masyarakat bahwa perpustakaan merupakan tempat eksklusif menimbulkan keengganan untuk berkunjung.

Optimalisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dilaksanakan dengan cara; dilakukan *pra* dan *post test* serta survey kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pengukuran tingkat keberhasilan serta pencarian data *impact story* dari hasil pelatihan yang diikuti, dilakukan proses evaluasi setiap akhir kegiatan untuk melihat kekurangan yang ada yang kemudian dilakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya, dilakukan kajian atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada masyarakat yang menjadi peserta kegiatan-kegiatan tersebut, serta peningkatan-kegiatan baru setiap tahunnya.

Referensi

- Akhmad Syaekhu Rakhma & Arief Hidayat. (2022). Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). *Alur Sejarah : Jurnal Pendidikan Sejarah*. Volume 5, No 1.
- Dadan Rohimat, Rita Rahmawati, G. G. S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kotaku / Pnpm Di Kecamatan Ciawi*, 3, 71–80.
- Daniel Dhakidae. (2013). *Soekarno : membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Endarti, Sri. (2022). Perpustakaan sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. 2, No. 1.
- Faoziyah, Sitti. (2023). Inklusi Sosial dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial untuk Semua. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 5, no. 1.
- Firman, Muhammad., et al. (2023). Membantu Anak Muda Mewujudkan Impian Bisnis Mereka: Program Pendampingan Kewirausahaan bagi Generasi Milenial. *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 5.
- Ginting, Medyanita F. (2023). Pentingnya Inklusi Sosial dalam pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Kebijakan Publik. *Literacy Notes*, Vol. 1, No. 2.

- Gutama, Prima Putra & Widiyahseno, Bambang. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, Vol. 10 No. 1.
- Haryanti, Woro Tri. (2019). Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial. *TALENTA Conference Series 02*.
- Haryono, Nanang. (2012). Jejaring untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, Th. 4, No. 1.
- Ningrum, D. F. (2019). *Kegiatan Inklusi Sosial Di Perpustakaan Ganesha Sma N 1 Jetis Bantul*, 10(2), 123–131.
- Noor, Muhammad Usman. (2019). Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet untuk Menumbuhkan Inklusi Sosial di Perpustakaan Daerah. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, Vol. 4 No. 1
- Prasetyo, Wahyu Deni & Dian Utami. (2020). Penguatan Perpustakaan untuk Pembangunan: Sebuah Konsep Transformasi Berbasis Inklusi Sosial. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, Vol. 5, No. 2.
- Torano, Kusdiningsih M. (2021). Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dalam Mendukung Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial. *Jurnal Abdimas Bongaya*, Vol. 1, No.2.